

**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN KAB. SERUYAN  
TAHUN 2024**



**KUALA PEMBUANG  
2023**

---



**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 100.3.3.2/235/2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 15).

#### **MEMUTUSKAN:**

#### **Menetapkan :**

- KESATU** : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024;

**KETIGA** : Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 7 Agustus 2023

**BUPATI SERUYAN,**  
  
**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 100.3.3.2/ 235 /2023**  
**TANGGAL 7 Agustus 2023**  
**TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN**  
**SERUYAN TAHUN 2024**

<b>PERANGKAT DAERAH</b>		
<b>NO</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan	
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan	
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan	
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan	
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan	
8	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan	

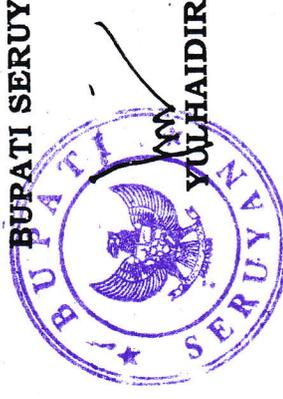
<b>PERANGKAT DAERAH</b>	
<b>NO</b>	<b>1</b>
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
21	Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

<b>PERANGKAT DAERAH</b>	
<b>NO</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
26	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan
28	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
30	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
32	Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan
33	Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan

## PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH	
NO	
1	
34	Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
35	Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan
36	Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
37	Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
38	Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan
39	Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan

BUPATI SERUYAN,





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 ini merupakan perwujudan pelaksanaan pembangunan Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah yang dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024 dengan tujuan sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan selama Tahun 2024, maka kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan Rencana Kerja dan sebagai acuan dalam menyusun program kebijakan di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Kuala Pembuang, Agustus 2023

Kejala Dinas ,

**dr.H.Reson Rusdianto, M.A.P**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19770222 200604 1 012



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Landasan Hukum .....	3
I.3 Maksud dan Tujuan.....	7
I.4 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO SANDI TAHUN LALU</b> .....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Sandi tahun lalu dan Capaian Renstra Diskominfo Sandi.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Sandi .....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo Sandi .....	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	17
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	20
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo Sandi .....	27
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b> .....	29
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	29
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	30



---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan perumusan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena Renja menterjemahkan Perencanaan Strategis Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah serta menjamin efektivitas dan efisiensi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan diperlukan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

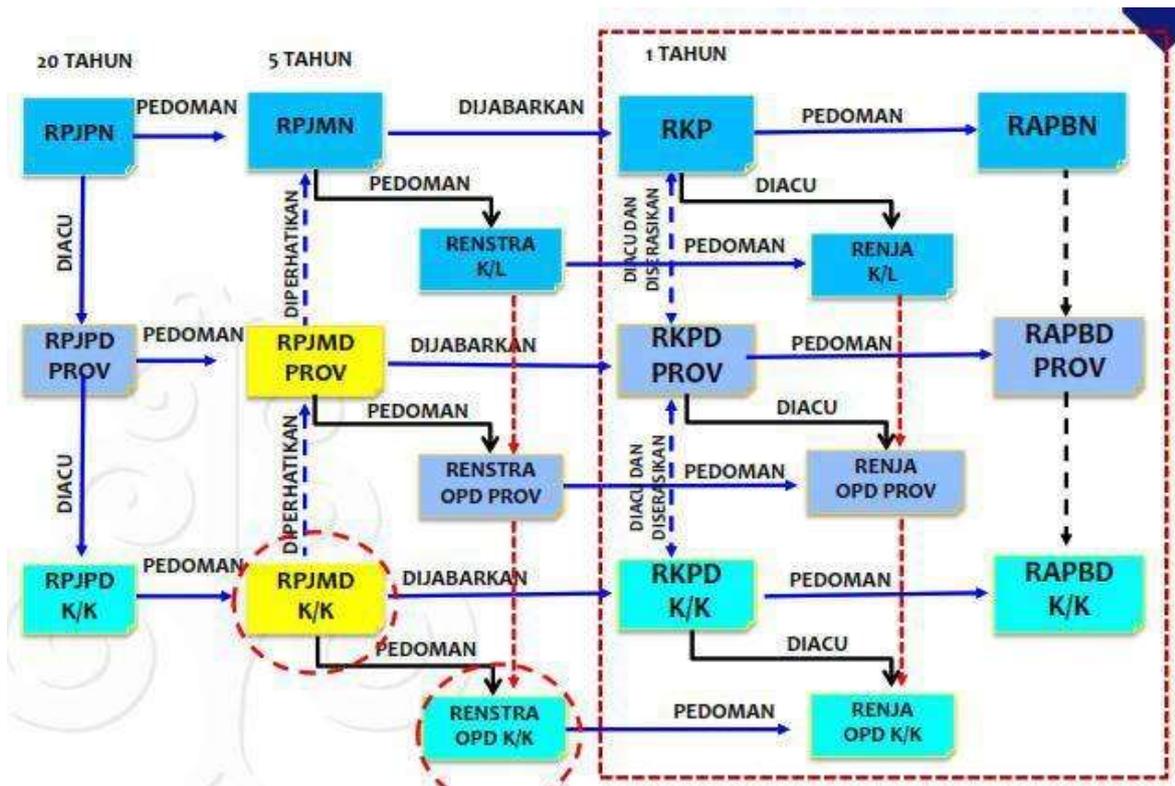
Rencana Kerja(Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Secara fungsional Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem pengelolaan keuangan.

**Gambar 1.1.**  
**Kedudukan RKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya**



## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Seruyan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 23);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
26. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2024 adalah sebagai arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2024.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2024, yaitu:

- a. Menyinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2024 dan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Seruyan;
- b. Sebagai landasan untuk sinkronisasi antara prioritas dan program strategis nasional dengan prioritas dan program pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten;



- c. Sebagai landasan penetapan program dan kegiatan perangkat daerah;
- d. Sebagai operasionalisasi RPD Kabupaten Seruyan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2024; serta
- e. Sebagai pedoman penyusunan KUA, PPAS, dan sebagai rujukan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.



## **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2024 ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II.HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah dan program dan kegiatan.

### **BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Merupakan substansi dari RKPD yang menguraikan daftar program dan kegiatan, diskripsi dan output serta outcome yang harus diwujudkan berikut jumlah dana yang dibutuhkan, serta lokasi kegiatan.

### **BAB V.PENUTUP**

Memuat uraian tentang hal – hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak agar Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan Tahun 2024 berdaya guna.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis SKPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan selama tahun sebelumnya dan perkiraan target tahun berikutnya. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



## B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra

Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022 (tahun berjalan) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan disajikan dalam bentuk matrik analisis, sebagaimana Tabel T-C. 29.



Dari Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan sampai dengan Tahun 2022 di atas dapat kita lihat tidak semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi sesuai target. Keterbatasan anggaran mengakibatkan sebagian program dan kegiatan yang direncanakan di Renstra tidak semua terakomodir.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan komunikasi dan informatika Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022 dan sampai dengan tahun berjalan terdapat hambatan karena berbagai faktor. Untuk pelaksanaan program pengembangan aplikasi informasi e-office, kendala yang dirasakan cukup berat, lokasi kegiatan yang sangat jauh dengan fasilitas yang kurang memadai dan infrastruktur yang belum baik menjadikan mobilitas orang dan barang tidak lancar, faktor alam yang kurang mendukung, kurangnya sumber daya manusia, baik kapabilitas maupun kuantitasnya, hingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak sesuai dengan jadwal dan kondisi yang direncanakan.

Langkah-langkah yang diambil dalam upaya menanggulangi atau meminimalkan faktor-faktor penghambat tersebut adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana mobilitas untuk ke lokasi kegiatan, memaksimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan koordinasi internal dan eksternal, baik antar instansi maupun masyarakat.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.



Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah;
- c. pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah;
- d. penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah;
- e. penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah; dan
- f. penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang didelegasikan dan atau dilimpahkan oleh Bupati Seruyan sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan secara terencana, terpadu dan menyeluruh.



Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
  - 2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Teknologi Informatika (TI), Telekomunikasi dan *E-Government*;
- e. Bidang Statistik;
- f. Bidang Persandian; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang pesat sekarang ini merupakan sebuah tantangan yang harus di hadapi oleh pemerintahan untuk menyempurnakan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi, agar pelayanan dapat terlaksana dengan cepat dan efisien. Pemerintah Daerah selaku pelayan masyarakat dituntut untuk selalu mengedepankan pelayanan yang prima yang sekarang dituntut untuk mewujudkan sistem pemerintahan E-Government.

- a. Tantangan
  - Terwujudnya E-Government
    - ✓ Menganalisis kebutuhan untuk perencanaan induk dalam mewujudkan E-Government.
    - ✓ Terwujudnya Pembangunan sistem Jaringan Intra Pemerintahan dan Jaringan Extranet untuk memudahkan dalam korespondensi dan berbagi data informasi lintas instansi Pemerintahan.
    - ✓ Pengembangan dan Pelatihan SDM di bidang Teknologi Informasi untuk pelaksana E-Government.
  - Pembangunan Data Center
    - ✓ Membuka Keterisolasian informasi kepada masyarakat.



- 
- ✓ Menganalisis kebutuhan untuk perencanaan sistem dalam memudahkan pelayanan informasi kepada masyarakat.
  - ✓ Peintergrasian sistem bank data center pada seluruh Instansi Pemerintah se-Kabupaten Seruyan.
  - Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Bidang POS, Penggunaan Frekuensi dan Radio
    - ✓ Menciptakan dan melaksanakan produk regulasi dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada bidang pos, penggunaan frekuensi dan radio.
    - ✓ Mengevaluasi pelaksanaan produk regulasi yang sudah diterbitkan pada masyarakat.
  - b. Peluang Pengembangan Pelayanan :
    - Terwujudnya E-Government
      - ✓ Berkembangnya teknologi yang lebih mudah dalam mewujudkan dan mengaplikasikan E-Government pada Pemerintahan Kabupaten Seruyan.
      - ✓ Adanya kebutuhan setiap instansi pemerintahan dalam korespondensi dan berbagi data informasi lintas instansi Pemerintahan.
      - ✓ Peningkatan jumlah SDM tiap tahun yang dapat menunjang pelaksanaan dalam sistem perangkat E-Government.
    - Pembangunan Data Center
      - ✓ Kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan untuk informasi pada Pemerintahan.
      - ✓ Perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan Media Center.
      - ✓ Pemanfaatan media center sebagai pusat data center yang diintergrasikan pada sistem data pada seluruh Instansi Pemerintah se-Kabupaten Seruyan.
    - Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Bidang POS, Penggunaan Frekuensi dan Radio



- ✓ Adanya usaha masyarakat dalam bidang pos, penggunaan frekuensi dan radio.
- ✓ Terciptanya ketertiban masyarakat dalam menjalankan usaha dalam bidang pos, penggunaan frekuensi dan radio.

### **2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian**

Berdasarkan indentifikasi isu-isu penting yang saat ini berkembang sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan yang juga menunjang terhadap visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan periode 2024-2026, maka dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Melaksanakan peran dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan Komunikasi, Pos dan Informatika.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dengan dukungan dari pihak swasta dan masyarakat dengan berbasis pada peningkatan ilmu pengetahuan melalui teknologi informasi.
3. Melaksanakan tugas dan kewenangan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dengan dukungan dari pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya.
4. Penegakan peraturan perundang-undangan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian di sektor komunikasi informatika statistic dan Persandian.
5. Keterisolasian Kecamatan dan Desa dari Akses Komunikasi dan Informasi sehingga belum lancarnya arus informasi hingga ke pelosok desa;
6. Kurangnya tugas fasilitasi, koordinasi, integrasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, lembaga komunikasi pemerintah daerah, lembaga komunikasi swasta dan media;



7. Belum adanya kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan pemberian bimbingan teknis, dan rekomendasi/perizinan dan monitoring media penyiaran;
8. Kurangnya bahan/sistem evaluasi komunikasi untuk bahan penataan, pemberdayaan dalam penyebarluasan informasi kepada publik.
9. Masih banyaknya daerah Blank Spot Area atau masih banyaknya desa yang tidak/belum terakses Telekomunikasi terutama di daerah hulu.
10. Operator/provider kurang berminat mendirikan Menara Telekomunikasi di daerah yang minim penduduknya, terutama di daerah hulu, kecuali sharing dengan Pemda, Pemda mendirikan Tower (BTS) dan provider yang mengisinya dan mengelolanya dengan sistem bagi hasil.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 terhadap analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dari usulan para pemangku kepentingan, dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, dari kecamatan yang langsung ditujukan kepada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, maupun dari hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan dan berdasarkan hasil musrembang kecamatan sampai dengan musrembang provinsi yang diterima Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan untuk tahun 2024, dengan program dan kegiatan yang berkelanjutan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.5



**Tabel 2.5**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  
Kabupaten Seruyan**

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
1	2	3	4	5	6
1	APBD Program Aplikasi Informatika/ Pengelolaan Pusat Data Pemerintah/Pembuatan dan Pelatihan Website Kecamatan	10 Kecamatan	Tersedianya Website Kecamatan	10 Bh	
2	APBD Program Aplikasi Informatika/ Pengelolaan Pusat Data Pemerintah/Pembuatan dan Pelatihan Website Desa	10 Kecamatan	Tersedianya website Desa	10 Bh	
3	APBD Program Aplikasi Informatika/ Pengelolaan Pusat Data Pemerintah/Pembuatan dan Pelatihan Website SKPD	Kab. Seruyan	Tersedianya Website SKPD	20 Bh	



4	APBD Program Aplikasi Informatika/ Pengelolaan Pusat Data Pemerintah/Pengembangan Infrastruktur TIK	Kab. Seruyan	Tersedianya Server Aplikasi SKPD, TTE, Srikandi, Email Pemerintah	3 Bh	
5	APBN Program Merdeka Sinyal BAKTI Kemkominfo RI	10 Kecamatan	Tersedianya Fasilitas Internet Desa/ Sekolah/ Puskesmas	10 Bh	



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional**

##### **A. Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika :

1. Penyediaan Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyediakan infrastruktur TIK serta ekosistem TIK yang merata di seluruh wilayah adalah:

- a. Penyediaan infrastruktur broadband melalui pembangunan jaringan backbone serat optik palapa ring
- b. Refarming spektrum frekuensi radio dan pengelolaan orbit satelit untuk implementasi broadband 4G di seluruh Kab/kota
- c. Penyediaan jasa akses layanan telekomunikasi melalui penyediaan pembiayaan KPU/USO
- d. Mendorong konsolidasi sektor TIK dan penyiaran untuk mencapai efisiensi industri
- e. Meningkatkan penggunaan TIK sebagai pendukung utama sektor strategis nasional
- f. Mendorong pemanfaatan TIK sebagai enabler pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan TIK bagi UMKM, petani dan nelayan
- g. Fasilitasi dalam menciptakan technopreneur Indonesia yang berdaya saing internasional
- h. Peningkatan kualitas serta kompetensi angkatan kerja sektor TIK
- i. Pelaksanaan Literasi TIK terhadap anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar



- j. Pengembangan dan pemberdayaan aplikasi e-pemerintahan, e-kesehatan, e-pariwisata, e-logistik, e-pendidikan, dan e-transportasi.
2. Menyediakan akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
- Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan akses dan kualitas informasi publik yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada masyarakat Indonesia terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah adalah :
- a. Menyebarluaskan pada publik narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah
  - b. Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat.
  - c. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah
  - d. Melaksanakan edukasi terkait kebijakan program pemerintah melalui seluruh saluran telekomunikasi yang tersedia.
3. Mewujudkan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif adalah:

- a. Menciptakan tata laksana Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.
- b. Mewujudkan 9 program Reformasi Birokrasi, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundangundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan



sistem manajemen SDM aparatur, Penguatan pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan kualitas layanan publik, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

B. Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Penyediaan sarana dan prasarana TIK bagi masyarakat dengan Strategi menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi kepada masyarakat
2. Sosialisasi penggunaan internet secara sehat dengan Strategi melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap situs-situs yang kurang mendidik
3. Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan/bimtek TIK dengan Strategi memberikan pelatihan bagi aparatur secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan TIK
4. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga pelatihan TIK Strategi melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM aparatur dalam bidang TIK, sandi dan statistik
5. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas unit kerja dalam pelayanan publik dengan Strategi menyediakan sarana dan prasana yang memadai
6. Menyusun regulasi (Pergub) agar master plan e-goverment menjadi acuan seluruh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Pemprov Kalteng untuk dalam membangun TIK melalui e-Government dengan Strategi menyusun rencana induk e-Government (Master Plan e-Goverment)
7. Melaksanakan studi kelayakan/studi banding dalam rangka pengembangan dan optimalisasi penerapan e-Government di



Pemprov Kalteng dengan Strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendukung penerapan e-Government di Pemprov Kalteng

8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang TIK dengan Strategi meningkatkan kualitas masyarakat dalam bidang TI
9. Menyelenggarakan penilaian dan pembinaan kepada masyarakat dan komunitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Prov. Kalteng dengan Strategi meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kalimantan Tengah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
10. Melaksanakan optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat dalam mendukung keterbukaan informasi publik dengan Strategi meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi
11. Meningkatkan kerjasama dengan media massa dalam penyebaran informasi kepada masyarakat dengan Strategi melakukan kerjasama dengan media massa

C. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPD Nasional 2024 – 2026.

1. Sasaran Makro Pendidikan;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar wilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kebudayaan

D. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Infrastruktur dan Energi;
2. Ekonomi Kerakyatan;
3. Pendidikan;
4. Kesehatan;



5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan percepatan pengentasan desa/kelurahan tertinggal;
6. Peningkatan Investasi dan dunia usaha;
7. Tata Ruang, sumber alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
8. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur;
9. Peningkatan kerukunan dan kedamaian serta kebudayaan;
10. Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).

#### E. Pemerintah Kabupaten

Arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk jangka menengah adalah merupakan arah bagi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian maupun lintas Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan mencermati gambaran umum situasi daerah guna mencapai tujuan strategis pembangunan daerah, maka Pemerintahan Kabupaten Seruyan ke depan memprioritaskan lima bidang pengembangan, yaitu:

1. Tercukupinya sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah yang diupayakan melalui peningkatan pembangunan Infrastruktur Daerah
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas investasi dengan memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, menciptakan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Lokal
4. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik
5. Peningkatan peranan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan sarana peribadatan dan pendidikan agama, penciptaan



kerukunan intern agama dan antar umat beragama, serta pembinaan terhadap umat beragama dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kelima bidang ini akan menjadi tumpuan perekonomian Kabupaten Seruyan masa depan yang akan terus digali, dikembangkan dan ditingkatkan.

**Tabel 3.1**

Identifikasi Kebijakan Nasional , Provinsi dan  
Kabupaten Seruyan

No.	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional	APBN	
1	Reformasi birokrasi dan tata kelola		
2	Pendidikan		
3	Kesehatan		
4	Penanggulangan Kemiskinan		
5	Ketahanan Pangan		
6	Infrastruktur		
7	Iklim Investasi dan Usaha		
8	Energi		
9	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana		
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Paska Politik		
11	Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi		
12	Politik, Hukum dan Keamanan		



13	Perekonomian		
14	Kesejahteraan Rakyat		
B	Provinsi	APBD PROV	
1	Infrastruktur dan Energi		
2	Ekonomi dan Kerakyatan		
3	Pendidikan		
4	Kesehatan		
5	Percepatan Penanggulangan kemiskinan dan percepatan pengentasan desa/ kelurahan tertinggal		
6	Peningkatan Investasi dan dunia usaha		
7	Tata Ruang, sumber daya alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana		
8	Pemberdayaan masyarakat dan aparatur		
9	Peningkatan kerukunan dan kedamaian serta kebudayaan		
10	Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance)		
C	Kabupaten	APBD KAB	
1	Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Pengentasan Desa Tertinggal		
2	Infrastruktur		
3	Pendidikan		



4	Kesehatan		
5	Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan serta Ketahanan Pangan		
6	Kependudukan dan Ketenagakerjaan serta Pariwisata		
7	Tata Ruang, Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup		
8	Energi		
9	Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi		
10	Investasi dan Dunia Usaha		
11	Pemerintah yang bersih, Profesional dan Responsif		

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026 dalam program dan kegiatan di tahun 2024 adalah sebagai berikut :



a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

b. Terwujudnya kelompok komunikasi informasi masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan misi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan adalah :

a. Meningkatnya penggunaan system informasi daerah

b. Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistic

c. Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah yang disajikan meliputi nama program dan kegiatan, deskripsi target outcome (program) dan output (kegiatan) yang harus diwujudkan berikut jumlah dana yang dibutuhkan serta lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024**

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 disusun menurut Urusan Pemerintahan. Pagu Anggaran Belanja Perangkat Daerah pada RKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2024 sebesar Rp. 7.181.306.000,00- .

Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 1 di lampiran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

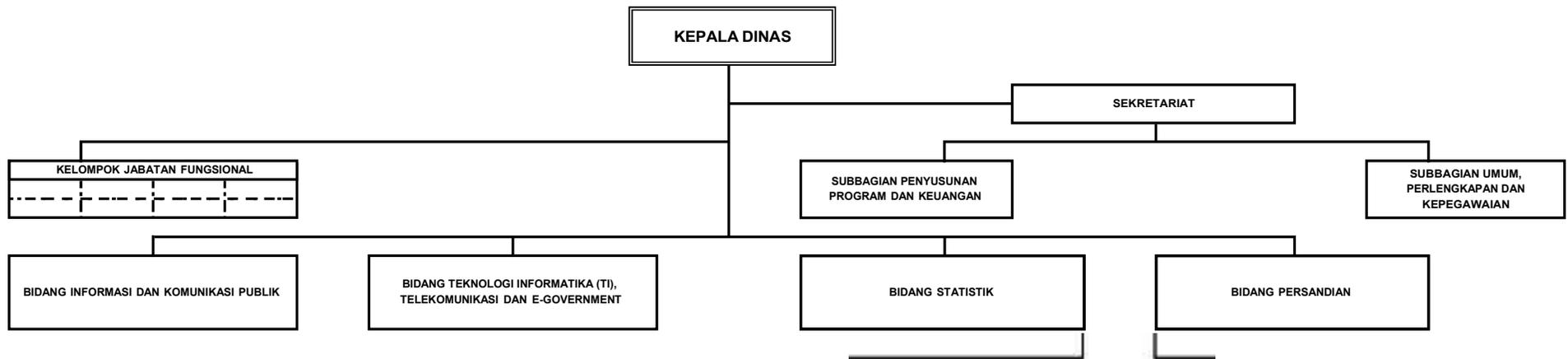
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan Program Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah serta mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin di capai.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan sangat mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten serta instansi terkait baik instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) PD ini dibuat untuk dijadikan Pedoman dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 22  
TAHUN 2022  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN SERUYAN**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN SERUYAN**



TABEL 2.1 (TC.29)  
 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
 s/d TAHUN 2022  
 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan RENJA Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA sampai dengan Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target RENJA Tahun 2021	Realisasi RENJA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan IV Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Triwulan IV Tahun 2022 (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11=(10 / 4)*100	12				
<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>															
2	16	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Persentase Jumlah Kegiatan yg dilaksanakan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	1,327	1,33	100	201	201	DISKOMINFO
2	16	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yg dilaksanakan	10	1.127	2	4	200,00	4	1.135	11.350	DISKOMINFO
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dan jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	42		10	20	200,00	1	21	50	DISKOMINFO
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dan Jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15		3	6	200,00	3	9	60	DISKOMINFO
2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15	200	3	206	6.866,67	27	433	2.887	DISKOMINFO
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	55		12	25	208,33	26	51	93	DISKOMINFO
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	25	200,28	1	207	20.700,00	1	408	1.633	DISKOMINFO

2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	88		18		-		-		-	DISKOMINFO
2	16	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20	5	4	175	4.375,00	2	182		910	DISKOMINFO
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan, Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	335		65	130	200,00		130		39	DISKOMINFO
						Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang diadakan	65		0	0	0		-		0	DISKOMINFO
2	16	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan	8		2	2	100,00	2	4		50	DISKOMINFO
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	10		1		-		-		-	DISKOMINFO
2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Kominfo yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	103	5	20	44,61	223,05	21	70		68	DISKOMINFO
2	16	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40	688	8	99,322	1.241,53	9	796		1.991	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	63	-	9	229,91	2.554,56	9	238,91		379	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah	211	23,61	62	100,61	162,27	62	186		88	DISKOMINFO

2	16	01	2.03	13	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perengkapan Kantor jumlah dan jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	99,05	0	0	0	99,05	991	DISKOMINFO	
2	16	01	2.03	03	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10		10	15	150,00	15	150	DISKOMINFO	
2	16	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	60		12	255,42	2.128,50	255	426	DISKOMINFO	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah dan Jenis bahan logistik kantor yang disediakan jumlah dan jenis orang/kegiatan yang disediakan makan dan minum	285	99,05	72	238,05	330,63	72	409	144	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah dan Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	70		0	0	-	342	342	489	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah dan Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	245880	139	49000	98,01	0,20	42000	42.237	17	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan Jenis Fasilitas Kunjungan Tamu	60	49	24	72,97	304,04	12	134	223	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Volume/Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	86		12	12	100,00		12	14	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1028	46	342	405,43	118,55	342	793	77	DISKOMINFO
2	16	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	10		2	2	100,00		102	1.020	DISKOMINFO
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Pengadaan Mabel yang disediakan	28		2	9	450,00	12	21	75	DISKOMINFO
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mabel	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17	-	0	0	-	0	0	0	DISKOMINFO
2	16	01	2.06		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20	12			-	969	981	4.905	DISKOMINFO

2	16	01	2.06	01	Paenyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos, Jumlah Pengiriman Paket	4000	129	800	1729,55	216,19	945	2.804	70,09	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	jumlah dan jenis Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	83	12	107,01	891,75	12	202	337	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dan Jenis Jasa Kebersihan Kantor jumlah dan jenis Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	30		45			12	12	40	DISKOMINFO
							111		0	0			-	0	DISKOMINFO
2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20		0	66		29	95	475	DISKOMINFO
2	16	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	62		12	36	300,00	14	50	81	DISKOMINFO
							2		0	0			-	-	DISKOMINFO
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60		15	30	200,00	15	45	75	DISKOMINFO
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana	Jumlah gedung kantor yang dibangun	4						-	-	DISKOMINFO
					Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1						-	-	DISKOMINFO
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau Bangunan	5						-	-	DISKOMINFO
2	16	02			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi</b>	<b>1</b>					<b>24</b>	<b>24</b>	<b>2.400</b>	<b>DISKOMINFO</b>
						Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	53						-	-	DISKOMINFO
						Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	99						-	-	DISKOMINFO

2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Media Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	104					24	24	23	DISKOMINFO
						Jumlah Surat Kabar Nasional	79					-	-	-	DISKOMINFO
						Jumlah Surat Kabar Lokal	75					-	-	-	DISKOMINFO
2	16	02	2.01	01	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	7					-	-	-	DISKOMINFO
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Aspirasi Publik	5					-	-	-	DISKOMINFO
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Data Informasi dan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah yang dimonitoring	5					-	-	-	DISKOMINFO
2	16	02	2.01	04	pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	jumlah dan jenis konten media komunikasi publik yang dikelola dan direncanakan	10	1	3	300,00	2	5	50	DISKOMINFO	
2	16	02	2.01	11	Penguat tata kelola komisi informasi di daerah	jumlah dan jenis penguat tata kelola komisi informasi daerah						-	-	#DIV/0!	DISKOMINFO
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi	200					-	-	-	DISKOMINFO
						Jumlah Kasus Sengketa Media Komunikasi dan Informasi yang diselesaikan	2					-	-	-	DISKOMINFO
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan media komunikasi publik	jumlah dan jenis Pengelolaan media komunikasi publik	97	1	72	7.200,00	24	96	99	DISKOMINFO	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi Publik	4					-	-	-	DISKOMINFO
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Jenis Layanan Hubungan Media	5					-	-	-	DISKOMINFO
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan Mitra Pemda	190					-	-	-	DISKOMINFO
2	16	02	2.01	10	penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	jumlah dan jenis penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	13		3			-	3	23	DISKOMINFO
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Jumlah Jenis Media yang bemitra dengan komunitas	104					-	-	-	DISKOMINFO
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23	1	3	300,00		3	13	DISKOMINFO	
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	350		3			3	6	2	DISKOMINFO

2	16	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain yang Dikelola	3	-	3	-	3	100	DISKOMINFO
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah dan jenis Pendaftar Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	5	1	3	300,00	3	60	DISKOMINFO
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan Sub Domain yang ditatalaksanakan dan dimonitoring	4	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah.	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemda yang Terselenggara	2	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
2	16	03	2.02		Kegiatan Pengelolaan e-government di Libngkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	140	-	3	-	3	2	DISKOMINFO
						Persentase Data yang Terkelola melalui E-Government	20	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
2	16	03	2.02	01	penatalaksanaan dan pengawasan E-government dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dan jenis penatalaksanaan dan pengawasan E-government dalam penyelenggaraan pemerintah	5	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
2	16	03	2.02	02	sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik	Jumlah Dokumen hasil sinkronisasi rencana dan anggaran induk pemerintah berbasis elektronik	2	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
2	16	03	2.02	03	pengelolaan pusat data pemerintah daerah	jumlah dan jenis pengelolaan pusat data pemerintah daerah	10	2	-	2	2	20	DISKOMINFO
2	16	03	2.02	04	penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah Sistem Komunikasi Intra Pemda yang diselenggarakan	5	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
2	16	03	2.02	05	Kordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	5	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
2	16	03	2.02	06	koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	4	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
2	16	03	2.02	07	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	jumlah dan jenis Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	5	1	-	1	1	20	DISKOMINFO
2	16	03	2.02	08	penyelenggaraan sistem penghubungan layanan pemerintah	Jumlah Jenis Layanan Pemerintah yang diselenggarakan	4	-	-	-	-	-	DISKOMINFO

2	16	03	2.02	09	pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas	jumlah dan jenis pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas	5	1	-	-	-	DISKOMINFO
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah dan jenis Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	1	1	-	-	-	DISKOMINFO
2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi</b>	-		-	-	-	DISKOMINFO
						<b>Buku Kabupaten Dalam Angka</b>	-		-	-	-	DISKOMINFO
						<b>Buku PDRB</b>	-		-	-	-	DISKOMINFO
2	20	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terselenggara	2	4	-	-	-	DISKOMINFO
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral yang dikumpulkan, diolah dan telah dianalisis	5	36	-	-	-	DISKOMINFO
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM Pemda yang mengikuti peningkatan kapasitas mutu statistik daerah yang terintegrasi	19		-	-	-	DISKOMINFO
2	20	02	2.01	03	Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah Jenis Metadata Statistik Sektoral yang Terbangun	4		-	-	-	DISKOMINFO
2	20	02	2.01	05	pengembangan infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Sistem Data Statistik yang Dikembangkan	4		-	-	-	DISKOMINFO
2	21	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah</b>	<b>60</b>		-	-	-	DISKOMINFO
2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandiaan untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Pemerintah Kabupaten yang Diamankan Melalui Penyelenggaraan Persandian	40		-	-	-	DISKOMINFO
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	5	1	-	-	-	DISKOMINFO
2	21	02	2.01	02	pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Data Hasil Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten	5	1	-	-	-	DISKOMINFO

2	21	02	2.01	04	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Jenis Layanan Keamanan Informasi Perangkat Kabupaten yang Disediakan	5		1		-		-		-		DISKOMINFO
2	21	02	2.02		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	41				-		-		-		DISKOMINFO
2	21	02	2.02	01	Oprasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Kabupaten yang Beroperasional	4		1		-		-				DISKOMINFO

Kuala Pembuang, Agustus 2023

Kepala Dinas,

dr.H. RESON RUSDIANTO, M.A.P

NIP. 19770222 200604 1 012

**LAMPIRAN II**

**DAFTAR USULAN PRIORITAS KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2024  
 BIDANG PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN PRIORITAS	KETERANGAN	LOKASI			VOLUME	USULAN PAGU	SUMBER DANA	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	KETERANGAN		
						KECAMATAN	DESA	DETAIL LOKASI						DISETUJUI	TIDAK DISETUJUI	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1				Pembangunan tower signal		Kec. Seruyan Hilir	MUARA DUA	RT.01, 02, 03 & 04 Desa Muara Dua	1 paket	200.000.000		DISKOMINFO				
2				Tower internet		Kec. Seruyan Hilir	PEMATANG LIMA					DISKOMINFO				
3				Pembangunan Tower Penguat Sinyal		Kec. Danau Sembuluh	Banua Usang		1 Unit	500.000.000		DISKOMINFO				
4				Penguatan Data Internet dan Penambahan Jarak Tangkap		Kec. Danau Sembuluh	Sembuluh 2		1 Paket			DISKOMINFO				
5				pembangunan tower Sinyal		Kec. Seruyan Raya	Lanpasa		1 Unit			DISKOMINFO				
6				Pengadaan Internet Kantor Desa		Kec. Danau Seluluk	Desa Tanjung Rangas II		1 Unit			DISKOMINFO				
7				JARINGAN BTS		Kec. Danau Seluluk	Desa Tanjung Hara		1 buah			DISKOMINFO				
8				INTERNET SMA Asam Baru		Kec. Danau Seluluk	Desa Asam Baru		1 Paket			DISKOMINFO				
9				Tower Signal		Kec. Seruyan Tengah	TANGGA BATU		1 Unit			DISKOMINFO				
10				Jaringan Internet		Kec. Seruyan Tengah	SUKOREJO		1 Paket			DISKOMINFO				
11				Tower Sinyal Telkomsel		Kec. Seruyan Tengah	BUMI JAYA		1 Unit			DISKOMINFO				
12				Tower Telkomsel ukuran besar		Kec. Suling Tambun	Tumbang Langkai		1 paket			DISKOMINFO				
13				Tower Telkomsel ukuran besar		Kec. Suling Tambun	Tumbang Langkai		1 paket			DISKOMINFO				
14				Jaringan internet Desa		Kec. Suling Tambun	Tumbang Hentas		1 unit			DISKOMINFO				
15				Pembangunan Tower Telkomsel		Kec. Suling Tambun	Tumbang Setoli		1 unit			DISKOMINFO				
16				Tower Telkomsel		Kec. Suling Tambun	Tanjung Tukal		1 unit			DISKOMINFO				
17				Pembangunan Tower Telkomsel		Kec. Suling Tambun	Rangkang Munduk		1 unit			DISKOMINFO				

Tabel 2.4  
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024  
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. SERUYAN

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
<b>URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
1	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Jumlah Kegiatan yg dilaksanakan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>100 persen</b>	<b>5.862.819.000</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Jumlah Kegiatan yg dilaksanakan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>100 persen</b>	<b>5.862.819.000</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yg dilaksanakan</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>8.250.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yg dilaksanakan</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>8.250.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	10 dokumen	4.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	10 dokumen	4.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Seruyan	3 Laporan	3.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Seruyan	3 Laporan	3.750.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>3 kegiatan</b>	<b>3.738.540.328</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>3 kegiatan</b>	<b>3.738.540.328</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	13 org/ bulan	3.736.380.328	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	13 org/ bulan	3.736.380.328	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Seruyan	6 Laporan	2.160.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Seruyan	6 Laporan	2.160.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Seruyan	18 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Seruyan	18 Laporan	-	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>69.560.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>69.560.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Kab. Seruyan	1 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Kab. Seruyan	1 Paket	-	
	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan	Kab. Seruyan	2 orang	-	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan	Kab. Seruyan	2 orang	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Seruyan	1 orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Seruyan	1 orang	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Seruyan	20 orang	69.560.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Seruyan	20 orang	69.560.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>8 kegiatan</b>	<b>1.058.760.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>8 kegiatan</b>	<b>1.058.760.000</b>	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	3.635.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	3.635.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Seruyan	3 Paket	249.872.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Seruyan	3 Paket	249.872.500	
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	3 Laporan	-	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	3 Laporan	-	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	3.293.500	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	3.293.500	

	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	3	Paket	94.999.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	3	Paket	94.999.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Kab. Seruyan	1	Paket	9.250.000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Kab. Seruyan	1	Paket	9.250.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Seruyan	12	dokumen	11.580.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Seruyan	12	dokumen	11.580.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Seruyan	12	Laporan	-	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Seruyan	12	Laporan	-
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Seruyan	1	Laporan	686.130.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Seruyan	1	Laporan	686.130.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>2</b>	<b>kegiatan</b>	<b>21.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>2</b>	<b>kegiatan</b>	<b>21.000.000</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Seruyan	3	unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Seruyan	3	unit	-
	Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Seruyan	1	unit	21.000.000	Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Seruyan	1	unit	21.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>4</b>	<b>kegiatan</b>	<b>765.162.872</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>4</b>	<b>kegiatan</b>	<b>765.162.872</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	12	Laporan	4.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	12	Laporan	4.400.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Seruyan	12	Laporan	99.959.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Seruyan	12	Laporan	99.959.400
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	12	Laporan	660.803.472	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	12	Laporan	660.803.472
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>4</b>	<b>kegiatan</b>	<b>201.545.800</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>4</b>	<b>kegiatan</b>	<b>201.545.800</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Seruyan	12	unit	177.915.800	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Seruyan	12	unit	177.915.800
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Seruyan	10	unit	23.630.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Seruyan	10	unit	23.630.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Seruyan	1	unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Seruyan	1	unit	-
	Pemeliharaan / Rehabilitas sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor Atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Seruyan	1	unit	-	Pemeliharaan / Rehabilitas sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor Atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Seruyan	1	unit	-
<b>2</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>43</b>	<b>persen</b>	<b>1.075.775.000</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>43</b>	<b>persen</b>	<b>1.075.775.000</b>
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kab. Seruyan	53	Kelompok			Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kab. Seruyan	53	Kelompok	
		Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	Kab. Seruyan	70	Persen			Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	Kab. Seruyan	70	Persen	
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Media Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>18</b>	<b>media</b>	<b>1.075.775.000</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Media Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>18</b>	<b>media</b>	<b>1.075.775.000</b>
		Jumlah Surat Kabar Nasional	Kab. Seruyan	11	jenis			Jumlah Surat Kabar Nasional	Kab. Seruyan	11	jenis	
		Jumlah Surat Kabar Lokal	Kab. Seruyan	11	jenis			Jumlah Surat Kabar Lokal	Kab. Seruyan	11	jenis	
	perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik.	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik.	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-

	Monitoring Informasi dan Penetapan agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	Monitoring Informasi dan Penetapan agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-
	pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Seruyan	2	Dokumen	-	pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Seruyan	2	Dokumen	-
	penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-
	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Seruyan	24	Dokumen	1.075.775.000	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Seruyan	24	Dokumen	1.075.775.000
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-
	Layanan Hubungan Media	jumlah layanan hubungan media	Kab. Seruyan	1	Layanan	-	Layanan Hubungan Media	jumlah layanan hubungan media	Kab. Seruyan	1	Layanan	-
	kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Seruyan	35	Dokumen	-	kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Seruyan	35	Dokumen	-
	penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Seruyan	1	orang	-	penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Seruyan	1	orang	-
	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kab. Seruyan	20	Dokumen	-	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kab. Seruyan	20	Dokumen	-
	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1	unit	-	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1	unit	-
<b>3</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>60</b>	<b>persen</b>	<b>177.712.000</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>60</b>	<b>persen</b>	<b>177.712.000</b>
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Domain dan Sub Domain yang Dikelola</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>0</b>	<b>Domain</b>	<b>-</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Domain dan Sub Domain yang Dikelola</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>0</b>	<b>Domain</b>	<b>-</b>
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1	Domain	-	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1	Domain	-
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-
	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah.	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan	1	Unit	-	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah.	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan	1	Unit	-
	<b>Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>10</b>	<b>kegiatan</b>	<b>177.712.000</b>	<b>Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>10</b>	<b>kegiatan</b>	<b>177.712.000</b>
		<b>Persentase Data yang Terkelola melalui E-Government</b>	<b>Kab. Seruyan</b>					<b>Persentase Data yang Terkelola melalui E-Government</b>	<b>Kab. Seruyan</b>			
	penatalaksanaan dan pengawasan E-government dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	penatalaksanaan dan pengawasan E-government dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-
	sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-
	pengelolaan pusat data pemerintah daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kab. Seruyan	2	Unit	127.712.000	pengelolaan pusat data pemerintah daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kab. Seruyan	2	Unit	127.712.000
	penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-
	Kordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	Kordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-
	koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab. Seruyan	1	Perangkat Daerah	-	koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab. Seruyan	1	Perangkat Daerah	-

	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Seruyan	1	Perangkat Daerah	-	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Seruyan	1	Perangkat Daerah	-
	penyelenggaraan sistem penghubungan layanan pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan	1	Layanan	-	penyelenggaraan sistem penghubungan layanan pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan	1	Layanan	-
	pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan	1	Dokumen	50.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan	1	Dokumen	50.000.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STASISTIK</b>		<b>Kab. Seruyan</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STASISTIK</b>		<b>Kab. Seruyan</b>			
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>
		<b>Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>0</b>	<b>Ada</b>	<b>-</b>		<b>Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>0</b>	<b>Ada</b>	<b>-</b>
		<b>Buku Kabupaten Dalam Angka</b>			<b>ada</b>			<b>Buku Kabupaten Dalam Angka</b>			<b>ada</b>	
		<b>Buku "PDRB"</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>0</b>	<b>ada</b>			<b>Buku "PDRB"</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>0</b>	<b>ada</b>	
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Data Statistik Sektoral yang Terselenggara</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>0</b>	<b>data</b>		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Data Statistik Sektoral yang Terselenggara</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>0</b>	<b>data</b>	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Seruyan	1	Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Seruyan	1	Dokumen	50.000.000
	Peningkatan kapasitas SDM pemda dalam peningkatan mutu ststistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Seruyan	3	orang	-	Peningkatan kapasitas SDM pemda dalam peningkatan mutu ststistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Seruyan	3	orang	-
	Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-
	pengembangan infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Kab. Seruyan	1	Unit	-	pengembangan infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Kab. Seruyan	1	Unit	-
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>		<b>Kab. Seruyan</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>		<b>Kab. Seruyan</b>			
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>15.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>15.000.000</b>
		<b>Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah</b>						<b>Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah</b>				
	<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Informasi Pemerintah Kabupaten yang Diamankan Melalui Penyelenggaraan Persandian</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>15.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Informasi Pemerintah Kabupaten yang Diamankan Melalui Penyelenggaraan Persandian</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>15.000.000</b>
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-
	pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1	laporan	15.000.000	pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1	laporan	15.000.000
	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab. Seruyan	1	Perangkat Daerah	-	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab. Seruyan	1	Perangkat Daerah	-
	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>41</b>	<b>OPD</b>	<b>-</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>41</b>	<b>OPD</b>	<b>-</b>
	Oprasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kab. Seruyan	1	Perangkat Daerah	-	Oprasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kab. Seruyan	1	Perangkat Daerah	-

	7.181.306.000,00		7.181.306.000,00
--	------------------	--	------------------



					Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	8 Kegiatan	3.635.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.635.000,00	
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	100 %	5 Paket	8 Kegiatan	225.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	225.000.000,00
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	8 Kegiatan	3.293.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	329.350,00
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	8 Kegiatan	75.025.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.502.500,00
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	8 Kegiatan	9.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	925.000,00
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	8 Kegiatan	10.080.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.080.000,00
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	100 %	70 Laporan	8 Kegiatan	646.850.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	662.312.100,00
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							21.000.000,00				21.000.000,00	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	2 Kegiatan	21.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	21.000.000,00
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							790.162.872,00				790.162.872,00	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	4 Kegiatan	4.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.400.000,00
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	4 Kegiatan	99.959.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	99.959.400,00
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	4 Kegiatan	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	25.000.000,00
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	4 Kegiatan	660.803.472,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	660.803.472,00
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							201.545.000,00				201.545.000,00	
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	100 %	12 Unit	4 Kegiatan	177.915.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	177.915.000,00
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	100 %	10 Unit	4 Kegiatan	23.630.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	23.630.000,00
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							1.075.755.000,00				1.449.686.000,00	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1.075.755.000,00				1.449.686.000,00	



					Proporsi Rumah tangga dengan Akses internet	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 %	1 Dokumen	10 Kegiatan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00		
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												50.000.000,00		50.000.000,00
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL												50.000.000,00		50.000.000,00
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												50.000.000,00		50.000.000,00
2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														
					Persentase pelaksanaan program penyelenggaraan statistik sektoral Buku Kabupaten Dalam Angka	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terselenggara	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % - Ada	31 Dokumen	100 %	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	31 Dokumen	35.000.000,00		
2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral														
					Persentase pelaksanaan program penyelenggaraan statistik sektoral Buku Kabupaten Dalam Angka	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terselenggara	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % - Ada	12 Dokumen	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	12 Dokumen	15.000.000,00		
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												50.000.000,00		50.000.000,00
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI												50.000.000,00		50.000.000,00
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												30.000.000,00		30.000.000,00
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
					Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persentase Informasi Pemerintah Kabupaten yang Diamankan melalui Penyelenggaraan Persandian	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	15.000.000,00		
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan														
					Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Pemerintah Kabupaten yang Diamankan melalui Penyelenggaraan Persandian	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Laporan	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.000.000,00		
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota												20.000.000,00		20.000.000,00
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Perangkat Daerah	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	20.000.000,00		
<b>TOTAL</b>												<b>7.181.306.000,00</b>		<b>7.691.887.350,00</b>					

TABEL 1  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025  
**(Program Kegiatan Sesuai RENSTRA untuk Tahun 2024)**

**Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

Kodefikasi					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
Urusan	Bidang urusan	Prog	Keg	Sub keg				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
2					<b>URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
2	16				<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
2	16	01				Persentase Jumlah Kegiatan yg dilaksanakan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	100	persen	5.862.819.000	DAU	100	persen	5.516.768.000
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yg dilaksanakan	Kab. Seruyan	2	kegiatan	8.250.000	DAU	2	kegiatan	20.000.000
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	10	dokumen	4.500.000	DAU	10	dokumen	10.000.000
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Seruyan	3	Laporan	3.750.000	DAU	3	Laporan	10.000.000
2	16	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>3</b>	<b>kegiatan</b>	<b>3.738.540.328</b>	<b>DAU</b>	<b>3</b>	<b>kegiatan</b>	<b>3.659.539.528</b>
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	13	org/ bulan	3.736.380.328	DAU	13	org/ bulan	3.654.039.528
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Seruyan	6	Laporan	2.160.000	DAU	6	Laporan	2.500.000
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Seruyan	18	Laporan	-	DAU	18	Laporan	3.000.000
2	16	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>4</b>	<b>kegiatan</b>	<b>69.560.000</b>	<b>DAU</b>	<b>4</b>	<b>kegiatan</b>	<b>205.000.000</b>
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Kab. Seruyan	1	Paket	-	DAU	1	Paket	75.000.000
2	16	01	2,05	06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan	Kab. Seruyan	2	orang	-	DAU	2	orang	10.000.000
2	16	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Seruyan	1	orang	-	DAU	2	orang	20.000.000

2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Seruyan	20	orang	69.560.000	DAU	20	orang	100.000.000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>8</b>	<b>kegiatan</b>	<b>1.058.760.000</b>	<b>DAU</b>	<b>8</b>	<b>kegiatan</b>	<b>640.800.000</b>
2	16	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Seruyan	1	Paket	3.635.000	DAU	1	Paket	10.000.000
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Seruyan	3	Paket	249.872.500	DAU	3	Paket	100.000.000
2	16	01	2,06	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	3	Laporan	-	DAU	3	Laporan	10.000.000
2	16	01	2,06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Seruyan	1	Paket	3.293.500	DAU	1	Paket	5.000.000
2	16	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	3	Paket	94.999.000	DAU	3	Paket	75.000.000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	Kab. Seruyan	1	Paket	9.250.000	DAU	1	Paket	10.000.000
2	16	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Seruyan	12	dokumen	11.580.000	DAU	12	dokumen	10.800.000
2	16	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Seruyan	12	Laporan	-	DAU	12	Laporan	20.000.000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Seruyan	1	Laporan	686.130.000	DAU	1	Laporan	400.000.000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>2</b>	<b>kegiatan</b>	<b>21.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>2</b>	<b>kegiatan</b>	<b>100.000.000</b>
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Seruyan	3	unit	-	DAU	9	unit	50.000.000
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Seruyan	1	unit	21.000.000	DAU	5	unit	50.000.000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>4</b>	<b>kegiatan</b>	<b>765.162.872</b>	<b>DAU</b>	<b>4</b>	<b>kegiatan</b>	<b>641.428.472</b>
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	12	Laporan	4.400.000	DAU	12	Laporan	5.000.000
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Seruyan	12	Laporan	99.959.400	DAU	12	Laporan	85.000.000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	12	Laporan	660.803.472	DAU	12	Laporan	551.428.472
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>4</b>	<b>kegiatan</b>	<b>201.545.800</b>	<b>DAU</b>	<b>4</b>	<b>kegiatan</b>	<b>250.000.000</b>

2	16	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Seruyan	12	unit	177.915.800	DAU	12	unit	150.000.000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Seruyan	10	unit	23.630.000	DAU	10	unit	50.000.000
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Seruyan	1	unit	-	DAU	1	unit	25.000.000
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitas sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor Atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Seruyan	1	unit	-	DAU	1	unit	25.000.000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>43</b>	<b>persen</b>	<b>1.075.775.000</b>	<b>DAU</b>	<b>54</b>	<b>persen</b>	<b>1.085.000.000</b>
						Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kab. Seruyan	53	Kelompok		DAU	53	Kelompok	
						Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	Kab. Seruyan	70	Persen		DAU	89	Persen	
2	16	02	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Media Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>18</b>	<b>media</b>	<b>1.075.775.000</b>	<b>DAU</b>	<b>19</b>	<b>media</b>	<b>1.085.000.000</b>
						Jumlah Surat Kabar Nasional	Kab. Seruyan	11	jenis		DAU	14	jenis	
						Jumlah Surat Kabar Lokal	Kab. Seruyan	11	jenis		DAU	13	jenis	
2	16	02	2.01	01	perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik.	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	DAU	1	Dokumen	10.000.000
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	DAU	1	Dokumen	20.000.000
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	DAU	1	Dokumen	20.000.000
2	16	02	2.01	04	pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Seruyan	2	Dokumen	-	DAU	2	Dokumen	25.000.000
2	16	02	2.01	11	penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	DAU	1	Dokumen	20.000.000
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Seruyan	24	Dokumen	1.075.775.000	DAU	24	Dokumen	850.000.000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	DAU	1	Dokumen	25.000.000
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	jumlah layanan hubungan media	Kab. Seruyan	1	Layanan	-	DAU	1	Layanan	20.000.000
2	16	02	2.01	08	kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Seruyan	35	Dokumen	-	DAU	35	Dokumen	5.000.000
2	16	02	2.01	10	penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Seruyan	1	orang	-	DAU	1	orang	20.000.000

2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kab. Seruyan	20	Dokumen	-	DAU	20	Dokumen	20.000.000
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1	unit	-	DAU	1	unit	50.000.000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>60</b>	<b>persen</b>	<b>177.712.000</b>	<b>DAU</b>	<b>65</b>	<b>persen</b>	<b>355.000.000</b>
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Domain dan Sub Domain yang Dikelola</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>0</b>	<b>Domain</b>	<b>-</b>	<b>DAU</b>	<b>0</b>	<b>Domain</b>	<b>55.000.000</b>
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1	Domain	-	DAU	1	Domain	10.000.000
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	DAU	1	Dokumen	25.000.000
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah.	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan	1	Unit	-	DAU	0	Unit	20.000.000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>10</b>	<b>kegiatan</b>	<b>177.712.000</b>	<b>DAU</b>	<b>10</b>	<b>kegiatan</b>	<b>300.000.000</b>
						<b>Persentase Data yang Terkelola melalui E-Government</b>	<b>Kab. Seruyan</b>				<b>DAU</b>			
2	16	03	2,02	01	penatalaksanaan dan pengawasan E-government dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	DAU	1	Dokumen	50.000.000
2	16	03	2,02	02	sinkronisasi pengelolan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	DAU		Dokumen	10.000.000
2	16	03	2,02	03	pengelolaan pusat data pemerintah daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kab. Seruyan	2	Unit	127.712.000	DAU	2	Unit	20.000.000
2	16	03	2,02	04	penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	DAU	1	Dokumen	50.000.000
2	16	03	2,02	05	Kordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	DAU	1	Dokumen	20.000.000
2	16	03	2.02	06	koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab. Seruyan	1	Perangkat Daerah	-	DAU	1	Perangkat Daerah	30.000.000
2	16	03	2,02	07	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Seruyan	1	Perangkat Daerah	-	DAU	1	Perangkat Daerah	50.000.000

2	16	03	2,02	08	penyelenggaraan sistem penghubungan layanan pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan	1	Layanan	-	DAU	1	Layanan	25.000.000
2	16	03	2,02	09	pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	DAU	1	Dokumen	25.000.000
2	16	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Seruyan	1	Dokumen	50.000.000	DAU	10	Dokumen	20.000.000
<b>2</b>	<b>20</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISITIK</b>		<b>Kab. Seruyan</b>				<b>DAU</b>			
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>220.000.000</b>
						<b>Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>0</b>	<b>Ada</b>	<b>-</b>	<b>DAU</b>	<b>0</b>	<b>Ada</b>	<b>-</b>
						<b>Buku Kabupaten Dalam Angka</b>			<b>ada</b>				<b>ada</b>	
						<b>Buku "PDRB"</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>0</b>	<b>ada</b>		<b>DAU</b>	<b>0</b>	<b>ada</b>	
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Data Statistik Sektoral yang Terselenggara</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>0</b>	<b>data</b>		<b>DAU</b>	<b>0</b>	<b>data</b>	<b>220.000.000</b>
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Seruyan	1	Dokumen	50.000.000	DAU	1	Dokumen	50.000.000
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM pemda dalam peningkatan mutu ststistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Seruyan	3	orang	-	DAU	3	orang	20.000.000
2	20	02	2.01	03	Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	DAU	1	Dokumen	100.000.000
2	20	02	2.01	05	pengembangan infrastruktur	Jumlah Inftratstruktur Statistik	Kab. Seruyan	1	Unit	-	DAU	1	Unit	50.000.000
<b>2</b>	<b>21</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>		<b>Kab. Seruyan</b>				<b>DAU</b>			
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>15.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>220.000.000</b>
						<b>Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah</b>								
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Informasi Pemerintah Kabupaten yang Diamankan Melalui Penyelenggaraan Persandian</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>15.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>170.000.000</b>

2	21	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Seruyan	1	Dokumen	-	DAU	1	Dokumen	50.000.000
2	21	02	2,01	02	pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1	laporan	15.000.000	DAU	1	laporan	20.000.000
2	21	02	2,01	04	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab. Seruyan	1	Perangkat Daerah	-	DAU	1	Perangkat Daerah	100.000.000
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi</b>	<b>Kab. Seruyan</b>	<b>41</b>	<b>OPD</b>	<b>-</b>	<b>DAU</b>	<b>41</b>	<b>OPD</b>	<b>50.000.000</b>
2	21	02	2,02	01	Oprasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kab. Seruyan	1	Perangkat Daerah	-	DAU	1	Perangkat Daerah	50.000.000
										<b>7.181.306.000,00</b>				<b>7.396.768.000,00</b>

**TABEL 2**  
**PEMETAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA KEPENDAGRI NOMOR 9001.15.5-1317 TAHUN 2023**

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SERUYAN**

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024										KEPMENDAGRI NOMOR 9001.15.5-1317 TAHUN 2023									
Kodefikasi					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kodefikasi					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
Urusan	Bidang urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan					Urusan	Bidang urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan						
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	16				URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Kegiatan yg dilaksanakan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	5.807.851.000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Kegiatan yg dilaksanakan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	5.807.851.000		
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yg dilaksanakan	2 Kegiatan	8.250.000	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yg dilaksanakan	2 Kegiatan	8.250.000		
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	4.500.000	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	4.500.000		
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3.750.000	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3.750.000		
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3.659.199.528	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3.659.199.528		
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3.654.039.528	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3.654.039.528		
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2.160.000	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2.160.000		
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	3.000.000	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	3.000.000		
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Kegiatan	154.560.000	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Kegiatan	154.560.000		
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	75.000.000	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	75.000.000		
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	10.000.000	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	10.000.000		
2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	69.560.000	2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	69.560.000		

2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Kegiatan	998.133.600	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Kegiatan	998.133.600
2	16	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3.635.000	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3.635.000
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	225.000.000	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	225.000.000
2	16	01	2.06	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Jenis	25.000.000	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Jenis	25.000.000
2	16	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.293.500	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.293.500
2	16	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	75.025.000	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	75.025.000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	1 Paket	9.250.000	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	1 Paket	9.250.000
2	16	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.080.000	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.080.000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	646.850.100	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	646.850.100
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>21.000.000</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>21.000.000</b>
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	21.000.000	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	21.000.000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>765.162.872</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>765.162.872</b>
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.400.000	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.400.000
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	99.959.400	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	99.959.400
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	660.803.472	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	660.803.472
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>201.545.000</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>201.545.000</b>
2	16	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	177.915.000	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	177.915.000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	23.630.000	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	23.630.000

2	16	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi</b>	43%	1.075.755.000	2	16	02			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi</b>	43%	1.075.755.000	
						Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	53 Kelompok								Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	53 Kelompok		
2	16	02	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Media Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	18 Media	1.075.755.000	2	16	02	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Media Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	18 Media	1.075.755.000	
						Jumlah Surat Kabar Nasional	11 Jenis								Jumlah Surat Kabar Nasional	11 Jenis		
						Jumlah Surat Kabar Lokal	11 Jenis								Jumlah Surat Kabar Lokal	11 Jenis		
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	50.000.000	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	50.000.000	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	23 Media	925.755.000	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	23 Media	925.755.000	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2 Dokumen	50.000.000	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2 Dokumen	50.000.000	
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	20 Dokumen	50.000.000	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	20 Dokumen	50.000.000	

2	16	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet</b>	<b>60%</b>	<b>197.700.000</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet</b>	<b>60%</b>	<b>197.700.000</b>
2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Domain dan Sub Domain yang Dikelola</b>	<b>0 Domain</b>	<b>22.500.000</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Domain dan Sub Domain yang Dikelola</b>	<b>0 Domain</b>	<b>22.500.000</b>
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Domain	2.500.000	2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Domain	2.500.000
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10.000.000	2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10.000.000
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah.	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	10.000.000	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah.	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	10.000.000
2	16	03	2.02		<b>Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10 Kegiatan</b>	<b>175.200.000</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10 Kegiatan</b>	<b>175.200.000</b>
						<b>Persentase Data yang Terkelola melalui E-Government</b>									<b>Persentase Data yang Terkelola melalui E-Government</b>		
2	16	03	2.02	01	penatalaksanaan dan pengawasan E-government dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahn Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	2	16	03	2,02	0001	penatalaksanaan dan pengawasan E-government dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahn Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000
2	16	03	2.02	03	pengelolaan pusat data pemerintah daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	80.200.000	2	16	03	2,02	0003	pengelolaan pusat data pemerintah daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	80.200.000
2	16	03	2.02	09	pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	25.000.000	2	16	03	2,02	0009	pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	25.000.000
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50.000.000	2	16	03	2,02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50.000.000

2	20					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>									<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>							
2	20	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	50.000.000	2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	50.000.000				
							Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada								Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada					
2	20	02	2.01			<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terselenggara	Data	50.000.000	2	20	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terselenggara	Data	50.000.000				
2	20	02	2.01	01		Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	31 Dokumen	35.000.000	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	31 Dokumen	35.000.000				
2	20	02	2.01	03		Membangun metadada statistik sektoral	Jumlah Metadada Statistik Sektoral yang Dihimpun	12 Dokumen	15.000.000	2	20	02	2.01	0003	Membangun metadada statistik sektoral	Jumlah Metadada Statistik Sektoral yang Dihimpun	12 Dokumen	15.000.000				
2	21					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				2	21				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>							
2	21	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%	50.000.000	2	21	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%	50.000.000				
							Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah									Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah						
2	21	02	2.01			<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Informasi Pemerintah Kabupaten yang Diamankan Melalui Penyelenggaraan Persandian	100%	30.000.000	2	21	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Informasi Pemerintah Kabupaten yang Diamankan Melalui Penyelenggaraan Persandian	100%	30.000.000				
2	21	02	2.01	01		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	15.000.000	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	15.000.000				
2	21	02	2.01	02		pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.000.000	2	21	02	2.01	0002	pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.000.000				
2	21	02	2.02			<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	41 OPD	20.000.000	2	21	02	2.02		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	41 OPD	20.000.000				
2	21	02	2.02	01		Oprasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	20.000.000	2	21	02	2.02	0001	Oprasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	20.000.000				